



LAPORAN  
RINGKASAN EKSEKUTIF

# **PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BATAM 2021**

***FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS OF BATAM 2021***

**Penulis**

Dr. M. Rizal Taufikurahman



DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM

**Tahun 2021**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Pendahuluan

Pengelolaan program ketahanan pangan yang efektif, memerlukan informasi ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik, untuk dapat melaksanakan intervensi yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi. Upaya tersebut, memerlukan sarana dalam penentuan target intervensi sasaran geografis. Salah satu upaya untuk memenuhi tersedianya informasi mengenai situasi ketahanan pangan, dilaksanakan monitoring situasi ketahanan pangan wilayah melalui penyusunan dan pengembangan peta situasi ketahanan pangan. Peta ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan informasi lokasi keberadaan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Kerawanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Dimana kerawanan pangan dibedakan atas 2 macam yaitu (1) Kerawanan Pangan Kronis yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan; dan (2) Kerawanan Pangan Transien yaitu : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang tsunami).

Secara umum di Kota Batam penyebab kerawanan pangan yang sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut menjadi indikator dalam penyusunan FSVA Kota Batam yang berupa jumlah warung/ toko kelontong, persentase penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, jalan utama kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, jumlah kematian balita dan ibu saat melahirkan, jumlah penderita gizi buruk; dan jumlah sarana/ fasilitas kesehatan. Hal ini menjadi bagian studi analisis dari indikator tersebut akan dapat memetakan wilayah di Kota Batam yang termasuk dalam kategori rawan pangan dan tahan pangan, dan akan menggambarkan faktor utama yang menyebabkan suatu wilayah masuk kategori rawan pangan.



Sumber: BPS Kota Batam, Maret 2021

**Gambar 1.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam, 2016-2020

Berkaitan dengan hal tersebut, tercantum dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75

mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan, kerawanan pangan dan gizi.

Sebagai upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Kota Batam 2021 sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah Kota Batam sejak tahun 2021. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA*).

Pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan juga merupakan ketetapan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, di mana indikator pelayanan penanganan kerawanan pangan dalam rangka pencegahan rawan pangan dapat dilakukan melalui pendekatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*).

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis

pangan dalam pertahanan dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dengan demikian, urgensi data dan informasi tentang ketahanan pangan dan gizi seyogyanya komprehensif, akurat dan mutakhir menjadi salah satu dasar bagi para pembuat keputusan dalam penetapan kebijakan dan program intervensi serta lokasi program, baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah, termasuk Kota Batam. Termasuk pengelolaan program ketahanan pangan yang efektif, memerlukan informasi ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik, untuk dapat melaksanakan intervensi yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi. Upaya tersebut, memerlukan sarana dalam penentuan target intervensi sasaran geografis.

### **Finding: Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi**

Kelurahan Kota Batam diklasifikasikan menjadi 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

Berdasarkan hasil analisis FSVA 2021 Kota Batam menunjukkan bahwa kelurahan rentan pangan Prioritas 1-3 hanya berjumlah 16 kelurahan dari 64 kelurahan atau sebesar 25%. Hal ini berarti bahwa 25% kelurahan di Kota Batam masih rentan pangan. Terdapat tiga kelurahan yang masuk dalam Prioritas 1 yaitu Kelurahan Batu Legong, Kelurahan Bulang Lintang, dan Kelurahan Temoyong. Kemudian kelurahan yang masuk dalam Prioritas 2 adalah Kelurahan Kasu, Sekanak Raya, Pantai Gelam,

Pulau Setokok, Subang Mas, dan Air Raja. Adapun kelurahan yang masuk dalam prioritas 3 adalah Kelurahan Pulau Terong, Pemping, Temoyong, Pulau Abang, Karas, Sembulang, dan Galang Baru.

Masuknya kelurahan-kelurahan dalam prioritas 1-3 tersebut disebabkan oleh rendahnya nilai aspek ketersediaan pangan, aspek akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Karakteristik kelurahan rentan pangan ditandai dengan; (1) Kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut, (2) Banyaknya rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih, (3) Masih banyaknya keluarga dengan kondisi tidak sejahtera, dan (4) masih kurangnya sarana dan prasarana penyedia pangan di wilayah tersebut. Adapun untuk peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Batam 2021 disajikan pada Lampiran 1.

## Ketersediaan Pangan

Di Kota Batam, jumlah kelurahan yang masuk Prioritas 1-3 berjumlah 33 kelurahan dari 64 kelurahan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 33 kelurahan di Kota Batam masih kekurangan sarana dan prasarana penyedia pangan. Indikator dari sarana dan prasarana penyedia pangan di Kota Batam adalah jumlah warung/toko kelontong. Kelurahan yang masuk dalam Prioritas 1 adalah Kelurahan Pantai Gelang, Temoyong, dan Sekanak Raya. Kelurahan-kelurahan tersebut memerlukan perhatian serius dan fokus dalam menangani keberadaan sarana dan prasarana pangan agar pasokan pangan terjamin, aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Komoditas pangan dari komoditas ubi kayu merupakan salah satu komoditas tanaman pangan di Kota Batam menyumbang hampir 80,03% dari total produksi sereal. Demikian pula produksi umbi-umbian mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 3396 ton. Kontribusi terbesar terjadi

di Kecamatan Galang sebesar 710 ton, menyusul Kecamatan Sagulung sebesar 554 ton.

Adapun kecamatan yang merupakan sentra produksi komoditas ubi kayu terbesar di Kota Batam pada tahun 2020 meliputi Kecamatan Bulang, Sagulung, Galang, Sei Beduk dan Sekupang. Kecamatan Sagulung merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 966 ton dan Kecamatan Galang sebesar 414 ton. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketersediaan pangan pokok khususnya beras di Kota Batam masih sangat bergantung pada sentra produksi di luar Kota Batam. Pasokan pangan beras masih sangat bergantung pada impor.

## Akses Pangan

Akses rumah tangga terhadap pangan memiliki korelasi tinggi dengan status kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kota Batam terus mengalami penurunan dari 5,11% (67,41 ribu jiwa) tahun 2018 menjadi 4,75% (67,06 ribu jiwa) tahun 2020. Pada tingkat kelurahan berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2018, terdapat 10 kelurahan (16%) yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di atas 32,55% (Prioritas 1). Sebanyak 10 kelurahan (16%) masuk prioritas 2, dan 12 kelurahan (19%) masuk Prioritas 3.

Akses terhadap sarana penghubung (*connectivity facilities*) sangat penting untuk menentukan tingkat konektivitas antar kelurahan terhadap aksesibilitas, distribusi dan harga pangan. Pada dasarnya di Kota Batam, hampir semua kelurahan kisaran 87,5% memiliki akses penghubung yang baik bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah kelurahan yang berada di kecamatan yang berkategori daerah *mainland*.

Sementara itu, sisanya sebesar 12,5% terdapat kelurahan yang sebagian wilayahnya tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun yaitu di kecamatan

yang terkategori *hinterland*. Adapun kecamatan tersebut berjumlah 8 kelurahan yang berada di Kecamatan Belakang Padang dan Bulang. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Pulau Terong, Pecong, Kasu, Pemping, Temoyong, Batu Legong, Bulang Lintang dan Pulau Buluh.

## Pemanfaatan Pangan

Penyakit di Kota Batam umumnya disebabkan oleh terkontaminasinya pasokan air dan fasilitas tidak sehat, hal tersebut menghalangi tubuh untuk memanfaatkan gizi yang ada di makanan. Di Kota Batam, jumlah kelurahan yang masuk Prioritas 1-3 dalam indikator ini berjumlah 32 kelurahan dari 64 kelurahan. Dengan kata lain bahwa 32 kelurahan di Kota Batam masih dalam kondisi rawan aman pangan disebabkan oleh aksesibilitas air bersih. Kelurahan yang masuk dalam Prioritas 1 dalam indikator ini adalah Kelurahan Air Raja, Galang Baru, Sijantung, Rempang Cate, Batu Lengong, Bulang Lintang, Pulau Setotok, Kasu, Sekanak Raya, dan Pemping. Kelurahan-kelurahan tersebut memerlukan perhatian intensif dan perlunya berbagai program yang dapat melakukan perbaikan akses air bersih.

Di Kota Batam, jumlah kelurahan yang masuk prioritas 1-3 dalam indikator ketersediaan tenaga kesehatan sebanyak 32 kelurahan dari 64 kelurahan. Dengan kata lain sebanyak 32 kelurahan di Kota Batam masuk kategori rentan akan pangan menurut indikator keberadaan tenaga kesehatan. Kelurahan-kelurahan yang masuk kategori prioritas 1 adalah Kelurahan Subang Mas, Karas, Galang Baru, Sijantung, Batu Legong, Bulan Lintang, Pantai Gelam, Setokok, dan Kasu. Kelurahan-kelurahan tersebut memerlukan perhatian serius mengenai keberadaan tenaga kesehatan di wilayahnya. Artinya perlu dilakukan upaya pemenuhan jumlah rasio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduknya.

## Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan di Kota Batam adalah:

1. Untuk meningkatkan dan menjaga ketersediaan pangan maka perlu melakukan kerjasama skema *Government to Government* dengan wilayah sentra produksi di luar Kota Batam agar kontinuitas ketersediaan pangan terjamin juga stabilisasi harga terkendali.
2. Memastikan persediaan pangan dengan mengembangkan berbagai potensi pasar pangan melalui toko/warung pangan di Kota Batam.
3. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi pangan Kota Batam terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan.
4. Perlu memanfaatkan teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi pertanian terpadu daterpadu dan ramah lingkungan, efisien dan kualitas baik. Hal ini diharapkan dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
5. Peningkatkan pengawasan rantai pasok komoditas pangan guna menjada menjaga ketersediaan pasokan pangan.

Rekomendasi kebijakan peningkatan masyarakat terhadap akses pangan, adalah:

1. Memastikan harga pangan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui stabilisasi harga pangan dan menekan inflasi daerah. Jika diperlukan diberikan insentif dan berbagai jaring pengaman sosial bagi rumah tangga yang sangat rentan.
2. Meningkatkan upah riil Kota Batam melalui peningkatan nilai tambah industri pengolahan dan daya saing produk di pasar ekspor.
3. Memperluas lapangan kerja yang padat karya terutama yang memanfaatkan sumberdaya lokal (*lokal wisdom*) yang masih belum dioptimalkan, seperti penguatan industri kreatif, perdagangan dan pariwisata.
4. Pemerintah Daerah Kota Batam perlu melakukan penanggulangan kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kota

Batam tahun 2016-2021 tertuang dalam tujuan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya ketersediaan lapangan kerja yang mampu menyerap rumah tangga rentan miskin, peningkatan pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran.

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.
7. Melakukan penguatan lembaga latihan kerja dan pemberian/ pelaksanaan sertifikasi agar memenuhi standar akreditasi.
8. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan, dan kompetensi tenaga kerja dan SDM.
9. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dan peningkatan pengarusutaman gender (PUG) dalam pembangunan.

Rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan pangan:

1. Peningkatan infrastruktur untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah *hinterland*.
2. Tersedianya sumber-sumber air di daerah *hinterland* Kota Batam dalam upaya peningkatan pendukung produksi pangan pertanian dan peternakan.
3. Peningkatan ketersediaan jumlah sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan di level kelurahan.
4. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat *hinterland*.
5. Meningkatkan akses air bersih dan keberadaan tenaga kesehatan dalam rangka mengatasi masalah gizi masyarakat. Berkaitan dengan strategi ini terdapat tiga poin yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Fokus pada

kelompok rentan gizi, Anak usia di bawah dua tahun, Anak-anak kurang gizi ringan, Ibu hamil dan menyusui, Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui.

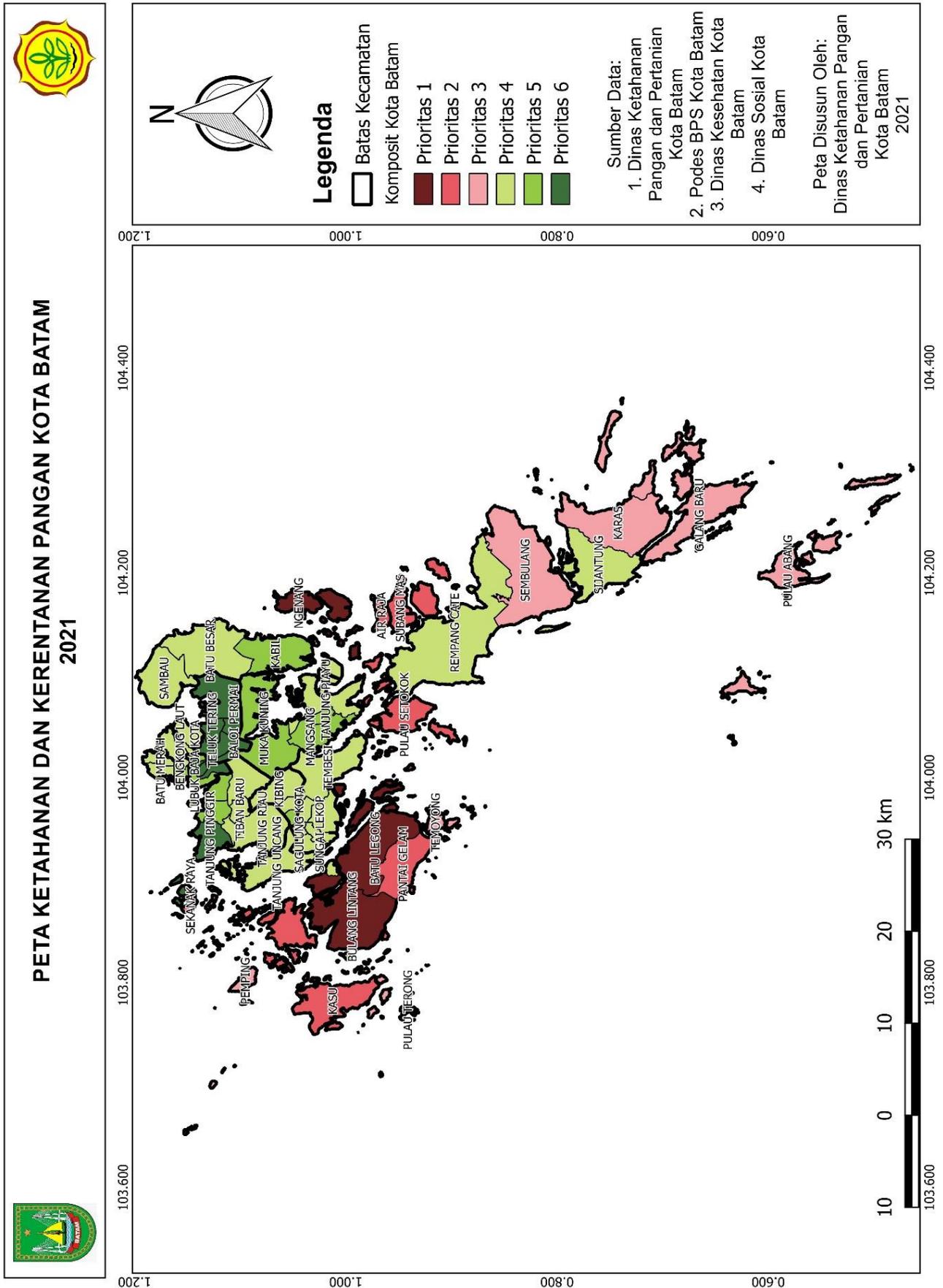
6. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi tiga penyebab dasar kekurangan gizi yaitu pangan, kesehatan dan pengasuhan.
7. Melakukan berbagai intervensi secara langsung dan tidak langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan) dan Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
8. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi. Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan.

## Intervensi Program

Intervensi program sebagai tindak lanjut rekomendasi yang disarankan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Demikian juga cara penyelesaiannya yang berbeda. FSVA Kota Batam yang disusun ini membantu memahami keadaan kelurahan. Diharapkan intervensi program ini merupakan upaya-upaya riil yang dapat membantu para pengambil kebijakan menentukan langkah-langkah tepat untuk menangani permasalahan ketahanan pangan yang relevan di setiap kelurahan di Kota Batam.

Secara lebih detail mengenai intervensi program yang disarankan berdasarkan kerangka dan alur kerja penyusunan FSVA Kota Batam 2021 ini, dapat disajikan dalam Lampiran 2.

Lampiran 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Batam



Lampiran 2. Intervensi Program Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Batam 2021

Kecamatan Kota Batam	Kelurahan	Ketersediaan		Akses		Pemanfaatan		Prioritas Komposit	Kelurahan Priorates	Intervensi Program Prioritas
		Sarana dan prasarana penyedia pangan	Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Akses penghubung yang memadai melalui (darat, air atau udara)	Keberadaan rumah tangga tanpa akses air bersih	Tenaga kesehatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BELAKANG PADANG	KASU	3	1	4	1	1	2			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Belakang Padang memiliki kondisi kelurahan-kelurahan dengan kerawanan dan ketahanan yang cukup beragam.</li> <li>Di kecamatan ini terdapat dua kelurahan yang masuk dalam prioritas ke dua untuk ditangani ketahanan pangannya.</li> <li>Beberapa Intervensi Program prioritas untuk beberapa kelurahan adalah:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya secara berkala dan terencana.</li> <li>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</li> <li>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Kota Batam</li> <li>Karena di Kecamatan Belakang Padang juga terdapat produksi pertanian namun produksinya semakin menurun maka diperlukan program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Selain itu juga diperlukan koordinasi dengan instansi lain terkait program untuk pengembangan pasar tradisional, peningkatan pendapatan rumah tangga dan penyediaan air bersih dan tenaga kesehatan.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
BELAKANG PADANG	SEKANAK RAYA	1	2	4	1	3	2			
BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	2	4	2	2	3			
BELAKANG PADANG	PEMPING	5	2	4	1	2	3			
BELAKANG PADANG	PECONG	5	1	4	4	2	5	Kelurahan Kasu dan Sekanak Raya		
BELAKANG PADANG	TANJIUNG SARI	6	3	4	2	4	6			

Lampiran 2. (Lanjutan)

Kecamatan Kota Batam	Kelurahan	Ketersediaan		Akses		Pemanfaatan		Prioritas Komposisi	Kelurahan Prioritas	Intervensi Program Prioritas
		Sarana dan prasarana penyedia pangan	Sarana dan prasarana penyedia pangan	Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Akses yang menghubungkan yang memadai melalui (darat, air atau udara)	Keberadaan rumah tangga tanpa akses air bersih	Tenaga kesehatan			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
BULANG	BATU LEGONG	3	3	1	4	1	1	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Bulang memiliki kondisi kelurahan-kelurahan dengan kerawanan dan ketahanan yang cukup beragam.</li> <li>Terdapat dua kelurahan yang masuk dalam prioritas 1 dan dua kelurahan yang masuk dalam prioritas 2 dan 1 kelurahan yang masuk pada prioritas 3 untuk ditangani ketahanan pangannya.</li> <li>Intervensi program prioritas yang tepat dan perlu dilakukan untuk ini adalah:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. program Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</li> <li>2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</li> <li>4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;</li> </ol> </li> <li>Karena di Kecamatan Bulang juga terdapat produksi pertanian yang bisa mendukung ketersediaan pangan maka diperlukan program:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</li> <li>2. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</li> <li>3. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.</li> </ol> </li> <li>Selain itu juga diperlukan koordinasi dengan instansi lain terkait program untuk ketahanan pangan di kecamatan ini hampir meliputi semua aspek ketahanan pangan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pasar tradisional;</li> <li>2. Peningkatan penghasilan rumah tangga, baik melalui penyediaan lapangan kerja atau meningkatkan kualitas pekerja; dan</li> <li>3. Fasilitasi penyediaan air bersih dan tenaga kesehatan.</li> </ol> </li> </ul>
BULANG	BULANG LINTANG	2	2	1	4	1	1	1		
BULANG	PANTAI GELAM	1	1	1	4	6	1	2		
BULANG	PULAU SETOKOK	3	3	1	4	1	1	2		
BULANG	TEMOYONG	1	1	2	4	2	2	3		
BULANG	PULAU BULUH	2	2	3	4	6	6	4		

Lampiran 2. (Lanjutan)

Kecamatan Kota Batam	Kelurahan	Ketersediaan		Akses		Pemanfaatan		Prioritas Komposit	Kelurahan Priorates	Intervensi Program Prioritas
		Sarana dan prasarana penyedia pangan	Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Akses penghubung yang memadai melalui (darat, air atau udara)	Keberadaan rumah tangga tanpa akses air bersih	Tenaga kesehatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GALANG	SUBANG MAS	5	1	1	3	1	2			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Galang memiliki kondisi kelurahan-kelurahan dengan kerawanan dan ketahanan yang cukup beragam.</li> <li>Terdapat dua kelurahan yang masuk dalam prioritas untuk ditangani ketahanan pangannya.</li> <li>Program prioritas untuk ini adalah:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;</li> <li>2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;</li> <li>4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kota;</li> <li>5. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>6. Karena di Kecamatan Galang juga terdapat produksi pertanian yang bisa mendukung ketersediaan pangan maka diperlukan program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</li> </ol> </li> <li>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.</li> <li>Selain itu juga diperlukan koordinasi dengan instansi lain terkait program untuk ketahanan pangan di kecamatan ini hampir meliputi semua aspek ketahanan pangan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan pasar tradisional;</li> <li>2. peningkatan penghasilan rumah tangga, baik melalui penyediaan lapangan kerja atau meningkatkan kualitas pekerja; dan</li> <li>3. fasilitasi penyediaan air bersih dan tenaga kesehatan.</li> </ol> </li> </ul>
GALANG	AIR RAJA	2	2	1	1	2	2			
GALANG	PULAU ABANG	4	1	3	3	2	3			
GALANG	KARAS	4	2	4	2	1	3			
GALANG	SEMBULANG	4	2	4	2	2	3			
GALANG	GALANG BARU	5	1	4	1	1	3			
GALANG	SIJANTUNG	6	2	4	1	1	4			
GALANG	REMPANG CATE	5	2	4	4	1	4			



DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM